

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Simpulan**

Peran pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengupayakan dialog guna resolusi konflik vertikal di Papua memang dinilai memiliki dua sisi aspek dalam perkembangannya. Presiden Jokowi sendiri memiliki faktor khusus dalam upaya memperoleh kepercayaan dari masyarakat akar rumput Papua, begitu dengan elit kelompok di Papua. Meskipun gagasan dialognya mengalami miskonsepsi dalam pemaknaannya oleh lembaga-lembaga negara yang dibawahinya, buah hasil dalam pembangunan dan intensitas kunjungan ke Papua mampu membangun tren positif dalam akseptasi baru masyarakat terhadap NKRI.

Kemudian Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengupayakan dialog tersebut ditandai dengan Presiden Jokowi telah menyetujui ingin melakukan dialog dan mengangkat *person in charge* untuk dialog sektoral. Sejauh yang sudah dilakukan dari dialog tersebut hanya sebatas menyelesaikan persoalan-persoalan khusus seperti pendidikan, kesehatan, dan jalur distribusi logistik saja. Pemerintah dengan masyarakat Papua belum ada kesepakatan konkrit dalam menentukan dan menyepakati tujuan utama dialog tersebut, belum membicarakan agenda, mekanisme dan mediator dialog yang lebih jauh.

## 4.2 Saran

Sehubungan dengan misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam mengupayakan dialog untuk menjadi resolusi konflik dalam penyelesaian konflik vertikal di Papua, dirasa perlu agar pemerintah untuk mengkonsolidasi kembali lembaga-lembaga negara dalam mengupayakan dialog sektoral tersebut. Lembaga negara merupakan elemen aparatur pemerintah sebagai agen perubahan yang menjadi representasi dari negara itu sendiri. Perbedaan paradigma dalam dialog juga merupakan kesalahan fatal atas langkah kebijakan yang akan diambil kedepannya. Belajar dari kesalahan masa lalu ketika konflik Aceh dan Timor Timur, dengan diberikannya kebijakan politik (seperti otonomi khusus, keistimewaan atau pembangunan eksklusif) sembari melakukan operasi militer maupun intelejen di daerah tersebut.

Suasana dialog pula harus dibangun dengan iklim perubahan bukan sebagai arena kontestasi politik yang bermuara pada menang-kalah (*zero-sum game*). Sangat penting bagi aktor yang berdialog untuk mereduksi identitas dan ego sektoral mereka yang terjebak dalam narasi besar seperti penjajah versus terjajah; pribumi versus non-pribumi; pelanggar HAM versus korban dan negara versus kelompok separatis. Karena tujuan awal dialog adalah untuk mencapai apa yang disebut oleh Lederach sebagai rekonsiliasi (*reconciliation*) dalam artian membangun kepercayaan (*trust*) antara pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk Bersama dan membicarakan apa yang ingin dilakukan dalam memitigasi konflik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> John Paul Lederach (1997), "*Building Peace: Sustainable Reconciliation in divided Societies*". Washington: USIP. Hlm. 78

Selain itu Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan pendekatan dengan berbagai unsur yang terlibat konflik vertikal di Papua selama ini. Pemerintah perlu melakukan pendekatan dengan akar rumput Papua yang terdiri dari unsur masyarakat Papua secara umum maupun suku-suku Papua baik di pesisir, pegunungan maupun perbatasan. Pendekatan antar kelompok dan pendekatan secara elit juga harus dilakukan, minimal pemerintah dan kelebagaannya mendapat pengakuan dan dukungan sebagian besar elit politik Papua, baik itu kepala suku, pemuka agama dan tokoh-tokoh lainnya yang berpengaruh besar dalam konstelasi perpolitikan di Papua. Pendekatan antar negara juga perlu dilakukan. Seperti Pemerintah Indonesia harus tergabung kedalam *Melanesian Spearhead Group* baik sebagai anggota maupun hanya peninjau, agar memiliki pengaruh dan dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara sekitar.